

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai ketentuan perundang-undangan, Presiden Republik Indonesia diberikan amanat untuk memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia. Meskipun begitu, sistem pemerintahan Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan tugas-tugas tertentu, maka dari itu pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan hak, wewenang, dan kewajiban oleh undang-undang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut disebut otonomi daerah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2011).

Pemerintah Daerah sama seperti Pemerintah Pusat wajib membuat rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RaPerda APBD) untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengurus daerahnya secara optimal. RaPerda tersebut nantinya akan dibahas bersama dengan DPRD dan disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda APBD. Perda APBD tersebut akan

digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah. APBD dapat dibagi menjadi pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat dibagi menjadi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD Kabupaten Tuban tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 11,79% dibanding tahun 2021 dengan proyeksi sebesar Rp2.081.873.318.487. Penurunan tersebut disebabkan karena ada beberapa akun pendapatan transfer yang tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan pada rancangan APBD tahun 2022.

Pendapatan transfer APBD Kabupaten Tuban dan daerah lainnya berasal dari belanja Pemerintah Pusat yang bersumber dari pendapatan negara. Penerimaan pendapatan negara Pemerintah Pusat tertinggi selama tahun 2019 sampai 2021 berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan masih didominasi oleh pajak penghasilan yang menyumbang pendapatan negara sebesar Rp683.774,60 miliar pada tahun 2021 atau sekitar 47,3% dari penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Pendapatan negara dari sektor perpajakan tetap dapat berjalan secara optimal meskipun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan banyak stimulus fiskal atau insentif perpajakan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan produktivitas pada sektor industri tertentu dalam mengurangi dampak dari wabah Covid-19. Penerimaan negara pada sektor perpajakan harus tetap berjalan secara optimal karena pajak merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Pada masa Pandemi Covid-19, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam memulihkan ekonomi

nasional. Pemerintah telah menyiapkan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 642,17 triliun

Salah satu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan adalah penghasilan dari usaha di sektor perkebunan. Di negara tropis seperti di Indonesia yang memiliki tanah yang subur dapat menjadi potensi yang sangat besar di sektor perkebunan jika dimanfaatkan secara optimal dengan memanfaatkan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,35% pada triwulan ketiga tahun 2021. Pada tahun sebelumnya, sektor pertanian memberikan andil terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 15,46%. Selain itu, selama bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2020, Indonesia menerima permintaan ekspor atas buah segar yang mengalami peningkatan sebesar 31,89% dibandingkan tahun lalu atau meningkat sebesar 375,04 ribu ton. Potensi yang sangat besar pada sektor pertanian dan perkebunan menjadi perhatian besar bagi para pelaku usaha dan pemerintah tidak terkecuali di Kabupaten Tuban.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pertanian dan hortikultura (Patiung, 2015). Salah satu produk unggulan nasional sektor perkebunan Kabupaten Tuban adalah belimbing Tasikmadu atau biasa disebut juga sebagai belimbing madu. Belimbing Tasikmadu merupakan jenis belimbing yang awalnya dibudidayakan di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang. Potensi yang besar membuatnya banyak dibudidayakan di tempat lain di Kabupaten Tuban. Dinas Pertanian Kabupaten Tuban ikut berperan dalam pengembangan dan pembudidayaan belimbing Tasikmadu agar hasil yang

didapat bisa optimal. Pada Tahun 2021, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga telah mengalokasikan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 yang diberlakukan pada tahun 2021. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara nasional. Berdasarkan buku Kabupaten Tuban Dalam Angka 2021, selama tahun 2017-2020 produksi buah belimbing terus mengalami peningkatan per tahun dengan perolehan terbesarnya pada tahun 2020 sebesar 3.793,5 ton. Belimbing Tasikmadu merupakan salah satu produk hortikultura lokal yang diharapkan mampu bersaing di pasar internasional (Hanafie & Herlina, 2015).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan terhadap pajak penghasilan orang pribadi bagi pelaku usaha buah belimbing. Objek penelitian yang diambil penulis adalah usaha belimbing orang pribadi yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Tuban. Lokasi objek yang diteliti difokuskan di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang. Penulis memilih lokasi tersebut karena desa tersebut merupakan awal mula terciptanya belimbing Tasikmadu dan desa tersebut juga memiliki potensi buah belimbing paling besar di Kabupaten Tuban. Meskipun mempunyai potensi yang sangat besar, ternyata masih banyak pengusaha belimbing yang belum mempunyai NPWP dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditunjukkan dari kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap manfaat dan kegunaan pajak. Atas dasar itulah penulis mengambil judul “Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan atas Usaha Belimbing di Desa Tasikmadu Kabupaten Tuban”. Penulis akan membahas tentang proses bisnis,

kewajiban perpajakan, potensi pajak penghasilan, dan *tax gap* usaha belimbing orang pribadi. *Tax gap* usaha belimbing orang pribadi ditentukan dengan menghitung selisih antara penghitungan potensi pajak penghasilan dan jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan usaha belimbing orang pribadi di KPP Pratama Tuban.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana proses bisnis usaha belimbing orang pribadi?
2. Bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan atas usaha belimbing orang pribadi?
3. Berapakah besar potensi Pajak Penghasilan dan *Tax gap* atas usaha belimbing orang pribadi?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi KPP Pratama Tuban dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pengusaha belimbing orang pribadi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Mengetahui proses bisnis usaha belimbing orang pribadi.
2. Mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan atas usaha belimbing orang pribadi.
3. Mengetahui jumlah potensi Pajak Penghasilan dan *Tax gap* atas usaha belimbing orang pribadi.

4. Mengetahui kendala yang dihadapi KPP Pratama Tuban dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pengusaha belimbing orang pribadi.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis menetapkan ruang lingkup penelitian pada pelaku usaha orang pribadi yang memiliki usaha belimbing di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang termasuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Tuban. Alasan penulis membatasi objek penelitian di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang karena desa tersebut merupakan awal mula terciptanya belimbing Tasikmadu. Selain itu, Desa Tasikmadu merupakan desa penghasil buah belimbing terbesar di Kabupaten Tuban.

Data dan informasi yang dihimpun penulis difokuskan pada pencarian potensi pajak dari usaha belimbing orang pribadi. Data dan informasi yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari pelaku usaha orang pribadi yang memiliki usaha belimbing dan KPP Pratama Tuban, serta dari literasi maupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi penulis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir digunakan sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa/i PKN STAN. Penulisan karya tulis ini juga dapat menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dalam mencari potensi pajak penghasilan.

2. Bagi KPP Pratama Tuban

Penulisan ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran terkait proses bisnis dan potensi pajak yang dihasilkan atas usaha belimbing sehingga penerimaan pajak menjadi lebih optimal.

3. Bagi petani dan masyarakat umum

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kewajiban perpajakan atas usaha pertanian dan/atau perkebunan serta diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat terkait pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan potensi pajak atas usaha pertanian dan/atau perkebunan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambar umum terkait permasalahan yang dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir. Penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai penjelasan terkait teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dalam pembahasan mengenai data dan informasi yang telah dikumpulkan. Penulis juga menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian diantaranya gambaran umum KPP Pratama Tuban, proses bisnis usaha belimbing, dan metode pengumpulan data yang menggunakan metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Bab ini juga akan membahas terkait permasalahan yang dirumuskan dalam Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian sesuai rumusan masalah dan tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis.